

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNAAN SETRUM IKAN DIKECEMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Zaiennor Anwari¹, Hanafi², Salafuddin Noor³

¹⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810171

²⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 0026079002

³⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1104017201

Email:zainhajazainnorr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan badan pengawasan sumber daya perikanan terhadap penggunaan alat setrum ikan di kecamatan danau panggang kabupaten hulu sungai utara dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh badan pengawasan sumber daya perikanan terhadap penggunaan alat setrum ikan di kecamatan danau panggang kabupaten hulu sungai utara.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan nara sumber yaitu Bapak Iyus, S.H. yang menjabat sebagai Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Bapak Agus Heriyadi, Spi. MP. Yang menjabat sebagai Pengawas Sumber Daya Perikanan di Kantor Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan pamong praja dan dinas pengawas perikanan kabupaten hulu sungai utara sudah dilakukan sebagaimana mestinya, kendala yang dialami oleh satuan polisi pamong praja dan pengawas perikanan kabupaten hulu sungai utara ini meliputi, kurangnya kordinasi dari penegak hukumnya, terkendala jarak dan waktu pelaksanaannya, kekurangan alat transportasi atau fasilitas untuk melakukan patroli, serta kegiatan lainnya yang menyangkut kegiatan penegakan hukum terhadap setrum ikan dan lain sebagainya, yang mengakibatkan pebegakan penegakan hukumnya tidak berjalan maksimal, dan juga budaya masyarakatnya yang kurang patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, dan penguna alat setrum ikan.*

ABSTRACT

This study aims to find out how the form of law enforcement carried out by the fisheries resources supervisory agency against the use of fish stun equipment in the sub-district of Danau Panggang Hulu Sungai Utara and what factors affect law enforcement carried out by the fisheries resources monitoring agency against the use of stun equipment. fish in the district of Baked Lake, North River upstream district. This research includes empirical research. The data collection used by the author is to conduct field studies, interviews with resource persons, namely Mr. Iyus, S.H. who served as Head of Investigation and Enforcement of the Civil Service Unit of Hulu Sungai Utara Regency, and Mr. Agus Heriyadi, Spi. MP. Who served as Supervisor of Fishery Resources at the Fishery Office of Hulu Sungai Utara Regency.

Law enforcement carried out by the civil service unit and the fisheries supervisory service for the upstream north river district has been carried out properly, the obstacles experienced by the civil service police unit and the fisheries supervisor for the upstream north river district include the lack of coordination from law enforcement, constrained distance and time of implementation , lack of transportation equipment or facilities to carry out patrols, as well as other activities related to law enforcement activities against fish stun and so on, which results in enforcement of law enforcement not running optimally, and also the culture of the people who are less obedient to the rules made by the government.

Keywords: *Law enforcement, and fish stun users.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Manuputty, dkk.2012. *Indentifikasi konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung*.Arus Timur:Makassar, hlm.1.
- Diana Hayati, Sri Mulyani (2016), “Dinamika Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 9 Nomor 1, hlm. 172
- Djoko Tribowono,*Hukum Perikanan Indonesia* ,PT Citra Aditya Bakti, Bandung.:2013, hlm.13.
- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 70.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2014, hlm.2.
- Noraini, (dkk), (2013), “Lingkungan Hidup”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Volume 20 Nomor 3, hlm. 241
- Pasal 69 ayat 1 butir (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.
- Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
- Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- Setia Budhi Irhamsyah, (dkk), (2021) “Pro Sejahtera”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3 Nomor 1 hlm. 5
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Iyus, S.H. yang menjabat sebagai Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin 04 Agustus 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Heriyadi, Spi. MP. Yang menjabat sebagai Pengawas Sumber Daya Perikanan di Kantor Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin, 15 Agustus 2022.